



## Pengaruh Kualitas E-Faktur, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Persepsi atas Tarif PPN sebagai Variabel Moderasi

**Meizar Azalea Nadhifya<sup>1</sup>, Sabaruddin Sabaruddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Indonesia, [mazaleanadhifya@gmail.com](mailto:mazaleanadhifya@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Indonesia, [sabaruddin@umj.ac.id](mailto:sabaruddin@umj.ac.id)

Corresponding Author: [mazaleanadhifya@gmail.com](mailto:mazaleanadhifya@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) remains a significant challenge in Indonesia despite ongoing tax administration reforms. The research gap of this study lies in the limited examination of the role of perceived Value Added Tax (VAT) rates as a moderating variable in the relationship between the quality of the e-Faktur system, tax knowledge, tax sanctions, and MSME taxpayer compliance. This study is essential considering that changes in VAT rate policies may influence taxpayers' perceptions and compliance behavior. Therefore, this research aims to analyze the effect of e-Faktur system quality, tax knowledge, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance, with perceived VAT rates as a moderating variable. This study employs a quantitative approach with a causal associative design. The sampling technique used is purposive sampling, involving 60 MSME taxpayers as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using the Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) method with the assistance of SmartPLS software. The results indicate that the quality of the e-Faktur system, tax knowledge, and tax sanctions have a positive effect on MSME taxpayer compliance. Furthermore, perceived VAT rates are proven to moderate the relationship between the independent variables and taxpayer compliance. The findings imply the importance of improving tax system quality, enhancing tax education, and formulating VAT policies that are perceived as fair to increase sustainable MSME tax compliance.*

**Keywords:** *e-Faktur System Quality, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Perceived VAT Rates, MSME Taxpayer Compliance*

**Abstrak:** Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia, meskipun modernisasi administrasi perpajakan terus dilakukan. Research gap penelitian ini terletak pada tertatitusnya kajian yang menguji peran persepsi atas tarif PPN sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kualitas sistem e-faktur, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini penting dilakukan mengingat perubahan kebijakan tarif PPN berpotensi memengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Kualitas E-Faktur, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

dengan Persepsi Atas Tarif PPN sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sifat asosiatif kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak UMKM. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas e-faktur, pengetahuan perpajakan, dan sanksi apajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi atas tarif PPN terbukti mampu memoderasi hubungan antara variabel independent dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kualitas sistem perpajakan, edukasi perpajakan, serta kebijakan tarif PPN yang dipersepsikan adil.

**Kata Kunci:** Kualitas E-Faktur, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Persepsi Atas Tarif PPN, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

---

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di Indonesia bersumber dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun kontribusi pajaknya masih relatif rendah, yang mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM (Jannah & Farida, 2023). Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap sistem e-Faktur, peraturan perpajakan, serta kemampuan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan perpajakan.

Sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem e-Faktur untuk meningkatkan efektivitas administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelaporan pajak serta mempermudah pengawasan transaksi (Ardiyani & Tantra, 2024). Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan (Sari, 2019; Maira & Meita, 2022), sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif akibat rendahnya kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem e-Faktur (Rahayu et al., 2018).

Selain kualitas sistem, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak juga berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai dapat mendorong kepatuhan, meskipun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang belum konsisten (Yulia, 2020; Yanti & Wijaya, 2023; Antameng et al., 2024). Demikian pula, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan masih menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada efektivitas penerapan dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap konsekuensi pelanggaran (Hantono & Sianturi, 2022; Wulandari & Putra, 2024).

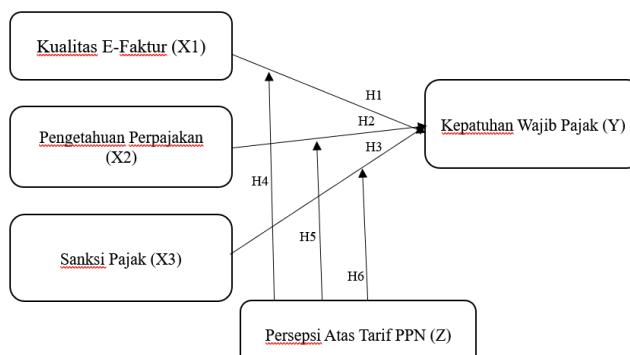
Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi terhadap tarif pajak. Tarif yang dipersepsikan adil dan proporsional dapat meningkatkan kepatuhan, sedangkan tarif yang dianggap memberatkan berpotensi menurunkannya (Chandra & Sandra, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Ariyanto & Nuswantara, 2020; Fitria & Supriyono, 2019; Rajwa et al., 2025).

Penelitian ini berlandaskan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Kualitas sistem e-Faktur, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak dipandang sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan persepsi

atas tarif PPN sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan mengintegrasikan ketiga variabel tersebut dalam satu model penelitian yang dimoderasi oleh persepsi atas tarif PPN setelah pemberlakuan tarif 12%, serta dilakukan pada wajib pajak UMKM di wilayah Pamulang menggunakan analisis SmartPLS.

### Hipotesis

- a) H1: Kualitas sistem e-Faktur berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b) H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c) H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d) H4: Persepsi atas tarif PPN memoderasi pengaruh kualitas sistem e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- e) H5: Persepsi atas tarif PPN memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- f) H6: Persepsi atas tarif PPN memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dirancang secara sistematis sebagai pedoman dalam pengumpulan, pengukuran, dan analisis data guna menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian. Desain penelitian berfungsi untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan terarah, efisien, serta menghasilkan temuan yang valid dan reliabel.

Metodologi penelitian merupakan rangkaian prosedur ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data secara objektif dan terukur, mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan. Pemilihan metodologi yang tepat diharapkan mampu menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam bidang akuntansi, penelitian kuantitatif menekankan pada pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini berlandaskan paradigma positivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif, dapat diamati, diukur, dan dijelaskan melalui hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, metode kuantitatif banyak digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel dalam penelitian akuntansi (Khaddafi et al., 2025).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji convergent validity bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator pada suatu konstruk mampu merepresentasikan variabel yang diukur secara konsisten. Convergent

validity dinyatakan terpenuhi apabila nilai outer loading masing-masing indikator lebih besar dari 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator memiliki korelasi kuat dengan konstruknya.

**Tabel 1. Hasil Uji Outer Loading Kualitas E-Faktur (X1)**

No	Instrumen Pertanyaan	Nilai Outer Loading	Rule of thumb	Keterangan
1	KE 1	0,846	> 0,7	Valid
2	KE 2	0,807	> 0,7	Valid
3	KE 3	0,824	> 0,7	Valid
4	KE 4	0,705	> 0,7	Valid
5	KE 5	0,724	> 0,7	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

**Tabel 2. Hasil Uji Outer Loading Pengetahuan Perpjakan (X2)**

No	Instrumen Pertanyaan	Nilai Outer Loading	Rule of thumb	Keterangan
1	PP 1	0,817	> 0,7	Valid
2	PP 2	0,828	> 0,7	Valid
3	PP 3	0,876	> 0,7	Valid
4	PP 4	0,783	> 0,7	Valid
5	PP 5	0,506	< 0,7	Tidak Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

**Tabel 3. Hasil Uji Outer Loading Sanksi Pajak (X3)**

No	Instrumen Pertanyaan	Nilai Outer Loading	Rule of thumb	Keterangan
1	SP 1	0,806	> 0,7	Valid
2	SP 2	0,824	> 0,7	Valid
3	SP 3	0,820	> 0,7	Valid
4	SP 4	0,612	< 0,7	Tidak Valid
5	SP 5	0,737	> 0,7	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

**Tabel 4. Hasil Uji Outer Loading Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

No	Instrumen Pertanyaan	Nilai Outer Loading	Rule of thumb	Keterangan
1	KWP 1	0,911	> 0,7	Valid
2	KWP 2	0,904	> 0,7	Valid
3	KWP 3	0,926	> 0,7	Valid
4	KWP 4	0,895	> 0,7	Valid
5	KWP 5	0,352	< 0,7	Tidak Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

**Tabel 5. Hasil Uji Outer Loading Persepsi Atas Tarif PPN (Z)**

No	Instrumen Pertanyaan	Nilai Outer Loading	Rule of thumb	Keterangan
1	PATP 1	0,797	> 0,7	Valid
2	PATP 2	0,817	> 0,7	Valid
3	PATP 3	0,914	> 0,7	Valid
4	PATP 4	0,844	> 0,7	Valid
5	PATP 5	-0,209	> 0,7	Tidak Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

## Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi dan keandalan indikator dalam mengukur suatu konstruk. Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Suatu konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,60, sedangkan nilai Composite Reliability > 0,70 menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi dan konsistensi internal yang memadai.

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Kualitas E-Faktur	0,841	0,888	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,864	0,910	Reliabel
Sanksi Pajak	0,829	0,878	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,827	0,874	Reliabel
Persepsi Atas Tarif PPN	0,682	0,826	

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

**Tabel 7. Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Rata-rata varians diekstrasi (AVE)
Kualitas E-Faktur	0,613
Pengetahuan Perpajakan	0,686
Sanksi Pajak	0,598
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,584
Persepsi Atas Tarif PPN	0,579

### Koefisien Determinasi atau R Square ( $R^2$ )

Berdasarkan Tabel 8, nilai R-square sebesar 0,767 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 76,7% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan 23,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai Adjusted R-square sebesar 0,735 menandakan bahwa model penelitian tetap memiliki daya jelaskan yang kuat setelah disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan.

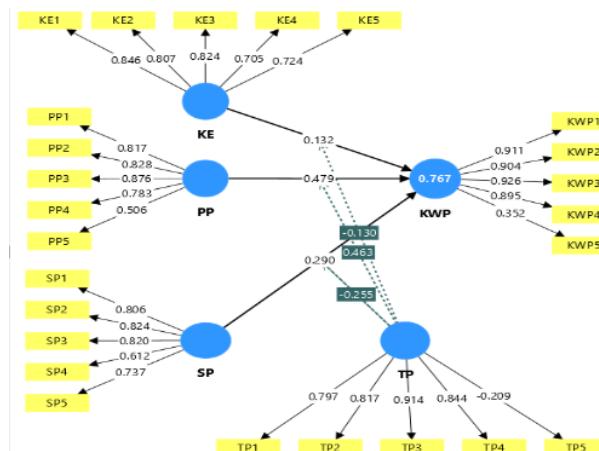
**Tabel 8. Hasil R Square ( $R^2$ )**

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,767	0,735

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

### Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Dalam pengembangan model penelitian, dilakukan beberapa tahap pengujian untuk memperoleh model terbaik berdasarkan evaluasi konstruk, validitas, dan reliabilitas. Pengujian model pengukuran (outer model) bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Hasil evaluasi outer model ditunjukkan melalui nilai outer loading yang dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.



Sumber: Hasil output SmartPLS 4, 2026

## Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T statistic ( O/STDEV )	P Values
<b>KE→KWP UMKM</b>	0,132	0,126	0,112	1,176	<b>0,240</b>
<b>PP→ KWP UMKM</b>	0,479	0,477	0,135	3,559	<b>0,000</b>
<b>SP→ KWP UMKM</b>	0,290	0,283	0,099	2,934	<b>0,003</b>
<b>PATP→ KWP</b>	0,85	0,112	0,118	0,717	<b>0,473</b>
<b>KE x PATP→ KWP UMKM</b>	-0,130	-0,103	0,151	0,860	<b>0,390</b>
<b>PP x PATP → KWP UMKM</b>	0,463	0,390	0,189	2,449	<b>0,014</b>
<b>SP x PATP → KWP UMKM</b>	-0,255	-0,219	0,139	1,830	<b>0,067</b>

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 4, (2026)

Berdasarkan Tabel 9, nilai **Original Sample (O)** digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu apakah pengaruh yang dihasilkan bersifat positif atau negatif. Sementara itu, nilai **Standard Deviation (STDEV)** mencerminkan tingkat penyebaran data terhadap nilai estimasi. Selanjutnya, nilai **T-statistic** dan **P-value** digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antarvariabel laten dalam model penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai **T-statistic** dengan **T-tabel sebesar 1,66** pada taraf signifikansi 5% menggunakan pengujian satu arah.

## Pembahasan

### Pengaruh Kualitas Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sistem e-Faktur memiliki arah pengaruh positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T-statistic yang lebih kecil dari T-tabel serta P-value yang melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sistem e-Faktur dinilai membantu secara teknis dalam proses administrasi perpajakan, keberadaannya belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak UMKM. Pelaku UMKM cenderung memandang e-Faktur sebagai sarana administratif semata, bukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar kualitas sistem e-Faktur.

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan membantu pelaku UMKM memahami prosedur, manfaat, serta konsekuensi perpajakan, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh kekhawatiran terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi mampu mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku, di mana pelaku UMKM cenderung lebih patuh ketika menyadari adanya konsekuensi yang tegas atas

pelanggaran perpajakan. Hasil ini mengindikasikan bahwa aspek penegakan hukum masih memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Persepsi atas Tarif PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi atas tarif PPN memiliki arah pengaruh positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap besar kecilnya tarif PPN tidak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya terlepas dari penilaian subjektif terhadap tarif PPN. Kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman dan kesadaran perpajakan, dibandingkan dengan persepsi terhadap kebijakan tarif yang ditetapkan pemerintah.

### **Pengaruh Kualitas Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Persepsi atas Tarif PPN sebagai Variabel Moderasi**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi atas tarif PPN tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas sistem e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai interaksi yang berarah negatif dan tidak signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap tarif PPN tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara kualitas sistem e-Faktur dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peran sistem e-Faktur sebagai sarana administratif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tidak bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tarif PPN.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Persepsi atas Tarif PPN sebagai Variabel Moderasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi atas tarif PPN mampu memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan akan semakin kuat ketika pelaku UMKM memiliki persepsi yang positif terhadap tarif PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan apabila diiringi dengan pandangan yang wajar dan dapat diterima terhadap kebijakan tarif pajak. Dengan demikian, persepsi atas tarif PPN berperan sebagai faktor penguatan dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Persepsi atas Tarif PPN sebagai Variabel Moderasi**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi atas tarif PPN tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Interaksi antara kedua variabel tersebut menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh persepsi pelaku UMKM terhadap tarif PPN. Pelaku UMKM tetap cenderung patuh karena adanya konsekuensi sanksi yang berlaku, terlepas dari pandangan mereka mengenai besar kecilnya tarif pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai perpajakan serta adanya

sanksi yang tegas mampu mendorong UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh.

Sementara itu, kualitas sistem e-Faktur dan persepsi atas tarif PPN tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang mengindikasikan bahwa faktor teknis sistem dan penilaian terhadap kebijakan tarif belum menjadi penentu utama perilaku kepatuhan.

Dalam pengujian moderasi, persepsi atas tarif PPN tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas e-Faktur maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan. Namun, persepsi atas tarif PPN terbukti mampu memoderasi secara positif dan signifikan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga pemahaman perpajakan akan lebih efektif meningkatkan kepatuhan apabila didukung oleh persepsi tarif yang adil dan dapat diterima.

## REFERENSI

- Akbar et al. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.47709/jebidi.v1i1.3>
- Antameng et al. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Ardiyani & Tantra. (2024). Analisis Penerapan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang). In *Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 5, Number 1). <http://jema.unw.ac.id>
- Ariyanto & Nuswantara. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Vol. 8, Number 3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Chandra & Sandra. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. 5(Desember), 153–168. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Fitria & Supriyono. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hantono & Sianturi. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Jannah & Farida. (2023). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surakarta.
- Khaddafi et al. (2025). Perbandingan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Arahan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 208–218. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1388>
- Kusufiyah et al. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 673–681. <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i4.1985>
- Maira & Meita. (2022). Pengaruh E-Faktur, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP dengan Sanksi Variabel Moderasi. In *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis* (Vol. 8, Number 4).
- Manrejo & Yulaeli. (2022). Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298–311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>

- Pakpahan et al. (2025). Pengaruh Pelanggaran Privasi Data Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Tokopedia Menggunakan Theory Of Planned Behavior (TPB). Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi, 8(2), 686–697. <https://doi.org/10.29408/jit.v8i2.30169>
- Purnamasari et al. (2024). Pengaruh Faktor Theory of Planned Behavior terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 2(4), 275–301. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i4.1058>
- Putra & Osman. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. Journal of Contemporary Accounting, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1>
- Putra. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem.
- Rahayu et al. (2018). Peran E-billing, E-faktur, Pelayanan Fiskus, Kemampuan Berinternet Terhadap Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) Wilayah Kota Surakarta.
- Rajwa et al. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.122>
- Sabaruddin, (2021) Antecedents for Individual Tax Compliance by self Assessment System Mediated: Learning and Education Based
- Sari. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri.
- Siahaan et al. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Aplikasi E- Faktur PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.
- Wulandari & Putra. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Penghasilan (PPH) Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Kalideres). <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Yanti & Wijaya. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Yulia et al. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang.